



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT KERJA : BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAN WAHYU ADI KARTIKA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 212795

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/134 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 155 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/200 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 313.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC ESTILO SEDAN Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 64.720.500**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 1**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	914.878.347
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1
Sub Total	Rp.	4.792.598.849
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.792.598.849

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.